



Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur

LAPORAN KINERJA

INSTANSI
PEMERINTAH

TAHUN 2020





Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana strategis 2019 – 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi



Jawa Timur dan Rencana Kerja Tahun 2020 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada **hakekatnya** merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Selanjutnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. Dan tak lupa juga dapat kami sampaikan di masa pandemi Covid-19 ini optimalisasi pengelolaan PAD dilakukan dengan berbagai cara antara lain menstimulus masyarakat dengan “pemutihan pajak” serta dengan Digitalisasi Pajak Daerah yang bekerjasama dengan Indomaret, Alfamart, Tokopedia,



Griya Bayar, Link Aja. Untuk digitalisasi Pajak Daerah di tengah pandemi covid-19, masyarakat sangat terbantu karena tidak perlu antri sehingga mengurangi resiko yang ada.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan tak lupa ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesaikannya laporan ini. Demikian laporan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, semoga bermanfaat

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surabaya, Pebruari 2021

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690916 199710 1 001



.//

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii

01

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN	2
1.1 Struktur Organisasi	4
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3 <i>Strategic Issue</i> Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	6
1.4 <i>Cascading Kinerja</i> Bapenda Prov Jatim	7
1.5 Peta Proses Bisnis	10
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.....	16

02

PERENCANAAN KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategi	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ...	23
2.3 Struktur Program dan Kegiatan 2020	26



2.4	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020	42
2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	43

03

AKUNTABILITAS KINERJA

III.	AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1	Capaian Kinerja Tahun 2020	53
3.2	Evaluasi dan Capaian Kinerja	56
3.2.1	Realisasi Anggaran	72
3.2.2	Cost Per Outcome	101
3.2.3	Analisis Efisiensi	105
3.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	107
3.3	TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP..	108

04

PENUTUP

IV.	PENUTUP	112
4.1	Kesimpulan	112
4.2	Permasalahan	113
4.3	Langkah Selanjutnya	116

LAMPIRAN

1. PENDANAAN INDIKATIF PADA RENSTRA
2. PERJANJIAN KINERJA 2020
3. DOKUMENTASI PENGHARGAAN TAHUN 2020



4. PROSES BISNIS BAPENDA PROV JATIM

TABEL

Tabel 2.1	Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran	21
Tabel 2.2	Strategi & Arah Kebijakan	23
Tabel 2.3	Struktur Program & Kegiatan	26
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja.....	43
Tabel 2.5	Program & Anggaran pada PK.....	44
Tabel 3.1	Skala Nilai Realisasi Kinerja	53
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Tahun 2020	54
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja	55
Tabel 3.4	Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2019 & 2020	56
Tabel 3.5	Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) Tahun Anggaran 2020	60
Tabel 3.6	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	62
Tabel 3.7	Rekapitulasi dan Capaian IKU 3	64
Tabel 3.8	Data Penggunaan Layanan Samsat Unggulan	70
Tabel 3.9	Komposisi Belanja	71
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Langsung	72
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran	102
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program	103



Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Per Sasaran	105
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra	107

GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Bapenda Prov. Jatim	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bapenda Prov. Jatim	4

GRAFIK

Grafik 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014-2020 untuk Indikator Kinerja Utama : Nilai Rata- rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	68
--	----





.//

Ringkasan Eksklusif

Laporan Kinerja menggambarkan dinamika Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sejak awal tahun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya, dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).



Data statistik per Januari s.d. Desember 2020 menunjukkan capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) telah terealisasi sebesar Rp 14.437.788.945.967,-* (**tanpa denda*), sehingga mampu melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini membuktikan walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini, melalui layanan kemudahan membayar pajak akan menstimulus masyarakat terhadap pembayaran Pajak Daerah.

Untuk pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikatornya Persentase kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) **tumbuh negatif sebesar (7,14%)** dengan capaian kinerja sampai akhir Desember 2020 adalah 31,72%;





2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan indikatornya Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2020 adalah 105,43%, Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2020 adalah 101,29%, untuk indikator Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2020 adalah 120,67% serta capaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sampai dengan akhir Desember 2020 adalah 105,01%;
3. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020, anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 156.318.345.457 (Belanja Langsung) telah terealisasi sebesar Rp 147.929.341.853 atau 94,63%.





Capaian tersebut tidak lepas dari upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Tim Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Serta hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai *feed back* dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.





BAB – 1

PENDAHULUAN

- 1.1 Struktur Organisasi
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 *Strategic Issue* Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- 1.4 *Cascading Kinerja* Bapenda Prov Jatim
- 1.5 Peta Proses Bisnis
- 1.6 Ringkasan LHE SAKIP Tahun 2019

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;



2. Mendorong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Timur terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Gambar 1.1 (Wilayah Kerja Badan Pendapatan Daerah)



UPT PPD

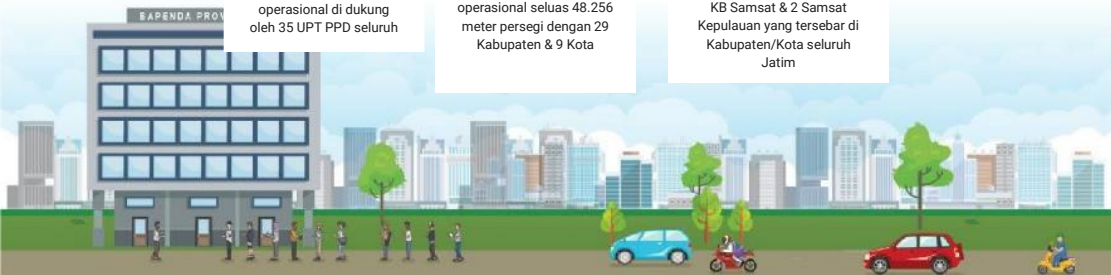
Bapenda Prov Jatim dalam pelaksanaan operasional di dukung oleh 35 UPT PPD seluruh

WILAYAH

Bapenda Prov Jatim memiliki cakupan wilayah operasional seluas 48.256 meter persegi dengan 29 Kabupaten & 9 Kota

KB SAMSAT

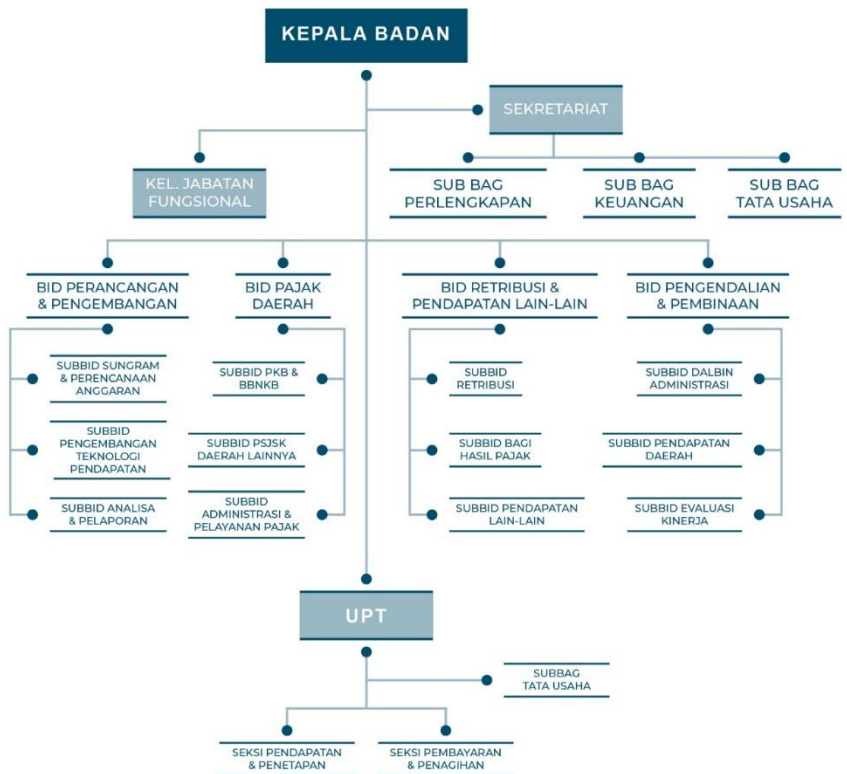
Serta dalam pelaksanaan operasional didukung oleh 46 KB Samsat & 2 Samsat Kepulauan yang tersebar di Kabupaten/Kota seluruh Jatim



1.1 Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur



1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah diuraikan diatas, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Jawa Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1

Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;

2

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;

3

Pemantauan, evaluasi & pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;

4

Pemantauan, evaluasi & pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;

5

Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan.



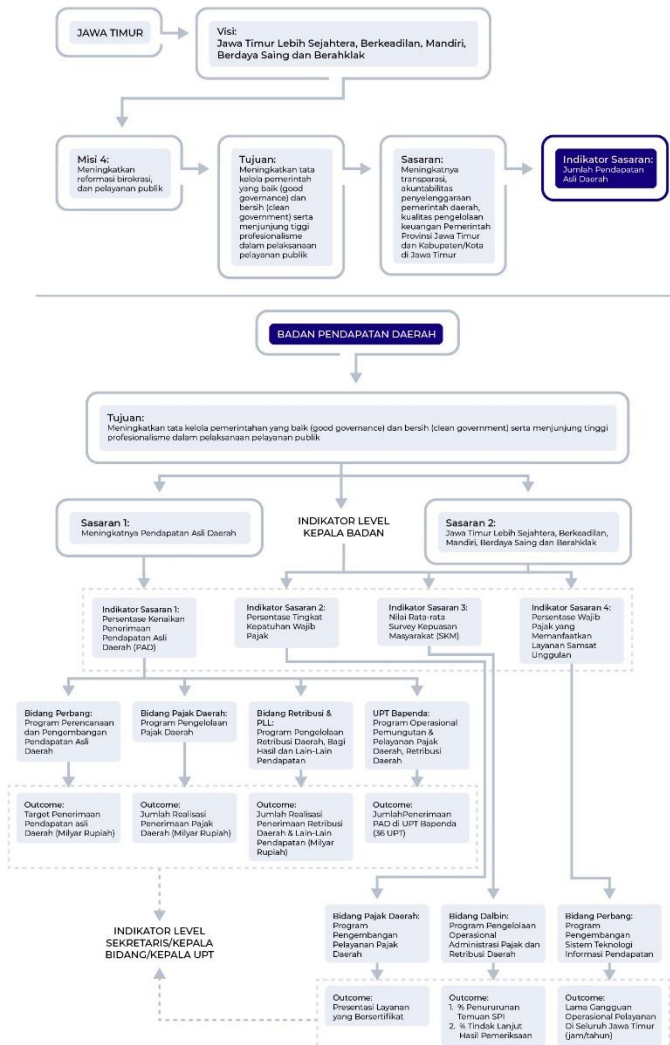
1.3 *Strategic Issue Bapenda Prov Jatim*

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun isu-isu strategis hasil diidentifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rentang optimal pada masa pandemi COVID-19, dengan cara pemberian insentif Pajak daerah berupa penghapusan denda maupun pengurangan pokok pajak;
2. Meningkatkan intensitas kerjasama penyelenggaraan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bersama dengan mitra dari sector swasta (perbankan, retail dan marketplace);
3. Menyempurnakan system administrasi perpajakan digital, salah satunya adalah e-TBPKB (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Elektronik) yang dikirim melalui media SMS maupun e-mail dan diakui sebagai alat bukti pembayaran yang sah.

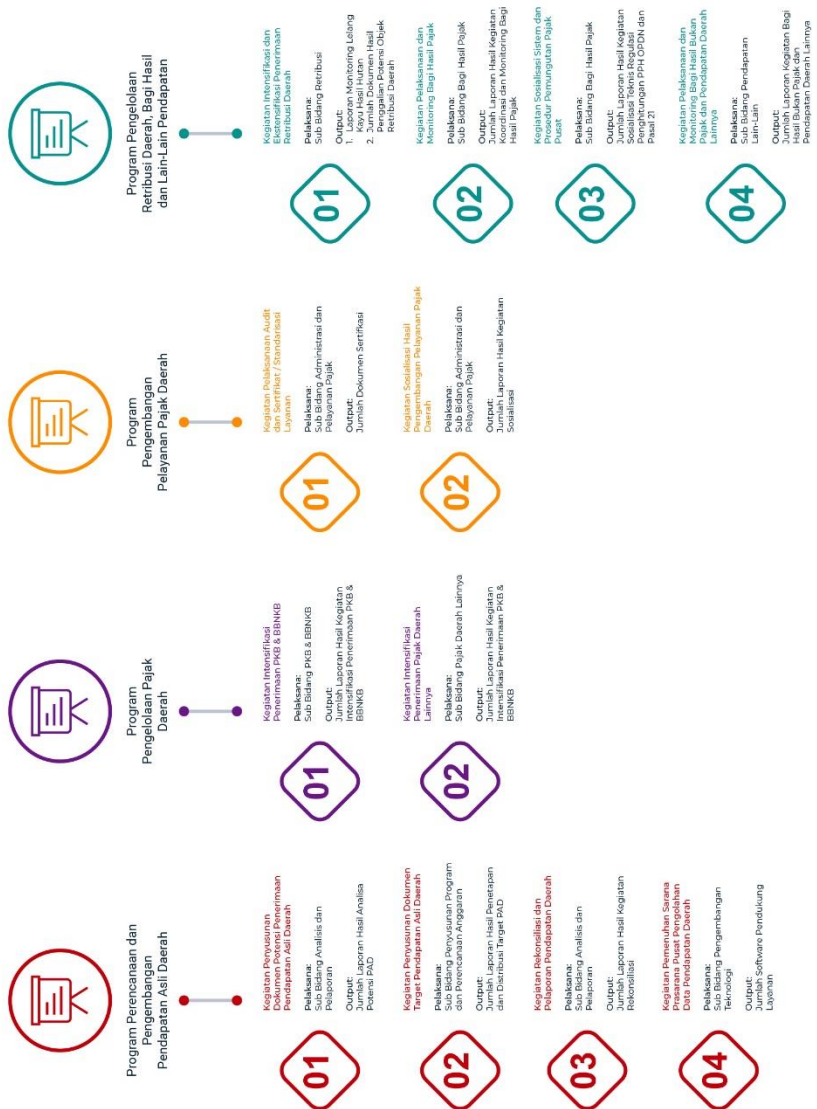


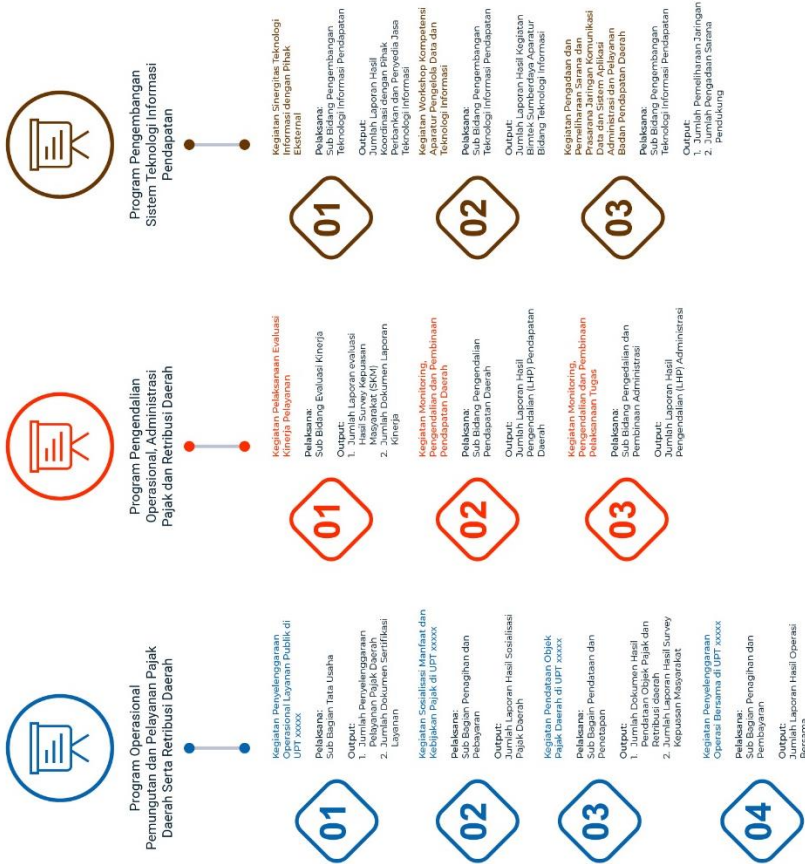
1.4 Cascading Kinerja Bapenda Prov Jatim



BAPENDA PROV. JATIM

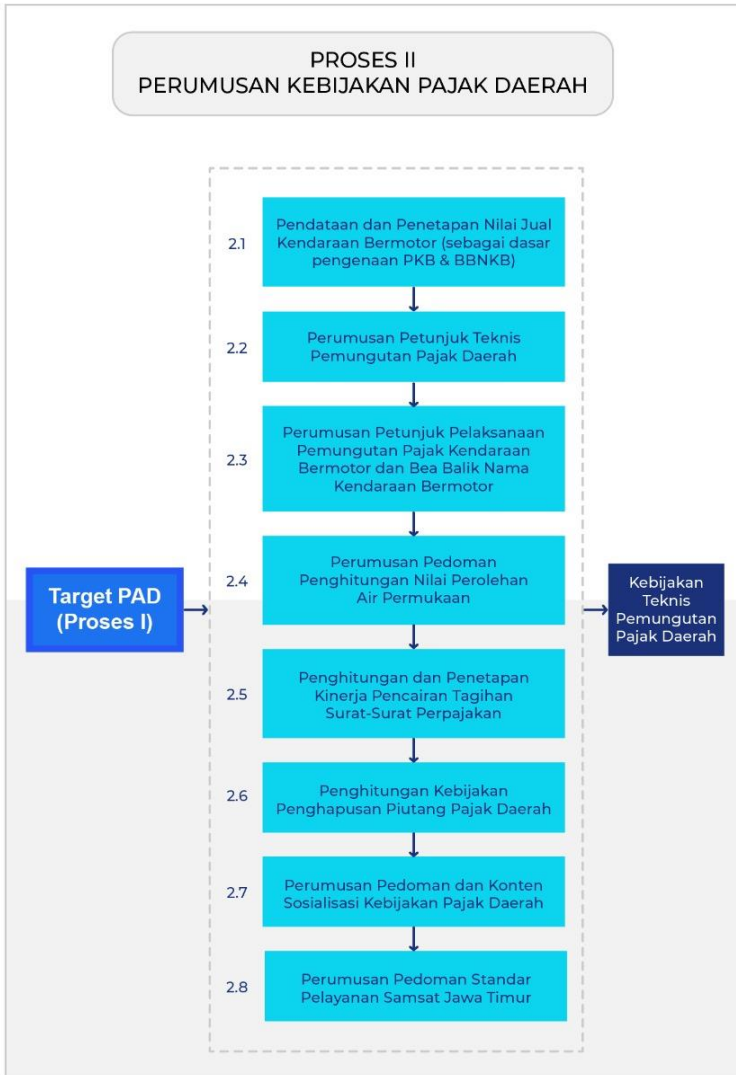




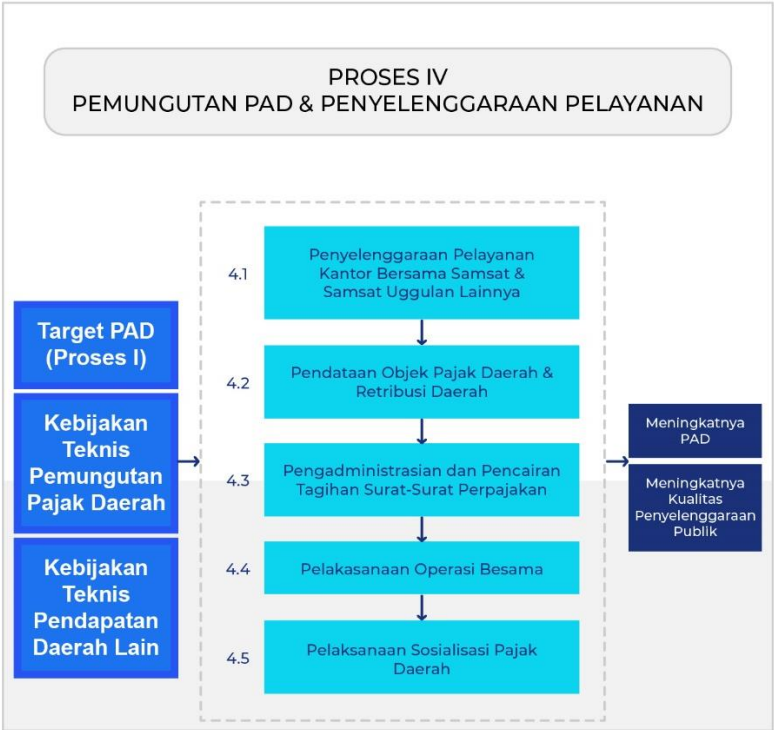


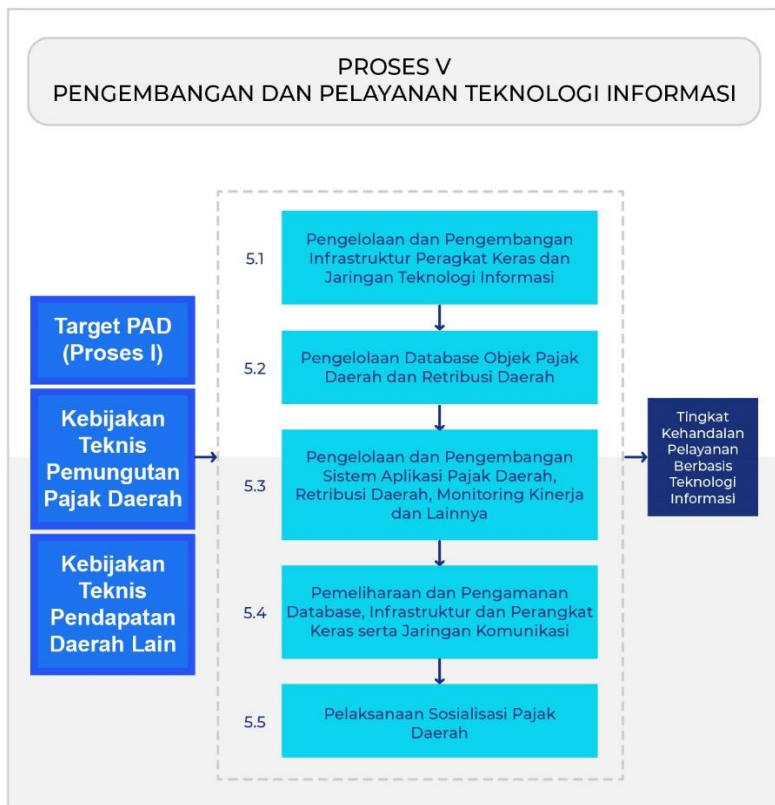
1.5 Peta Proses Bisnis

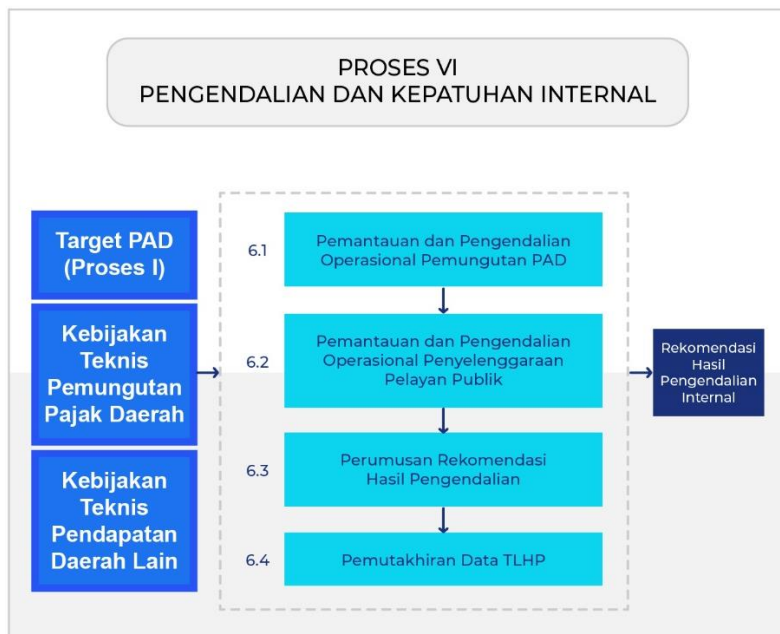












1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi tahun lalu (2019) menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 84,06 atau predikat A dengan interpretasi memuaskan. Penilaian tersebut menunjukkan memuaskan dalam memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Akan tetapi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan budaya kinerja, Perangkat Daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan keberhasilan prestasi kinerja yang sudah tercapai, namun dapat meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan, berupa komitmen bersama mulai antar bidang hingga dengan Perangkat Daerah lain yang terkait secara holistik dan spasial;
2. Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan Renstra Tahun 2019 – 2024 sebagai acuan dalam membangun Organisasi. Apabila diperlukan, perlu dilakukan pemutahiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini;
3. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras



dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP;

4. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI yang telah ada agar bias dioptimalkan. Memastikan seluruh jajaran (terutama UPT) agar dapat memanfaatkan aplikasi dengan baik;
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terutama pada level UPT;
6. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur agar senantiasa melakukan upaya inovasi untuk melakukan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.





BAB – 2

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategi
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Timur
- 2.3 Struktur Program dan Kegiatan
2020
- 2.4 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020
- 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

II. //

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selaku pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, ikut menyusun dokumen perencanaan strategis lima tahunan, yaitu Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas, merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Program dan Kegiatan Pembangunan beserta perencanaan anggaran yang direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan sarana untuk mencapai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu, ***“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”***. Melalui implementasi Misi ke-3, yaitu : ***“Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat***



Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan”

Secara umum fungsi Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro perangkat daerah yang di jadikan pedoman dalam hal :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), dokumen perencanaan tahunan sesuai dengan masa perencanaan pada Renstra yang digunakan sebagai dasar penganggaran pendapatan dan belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diamanahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



Berikut matriks hubungan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 :

Tabel 2.1 Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase kenaikan Pajak Daerah, retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah	Perencanaan dan pengembangan PAD	Target PAD
				Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah realisasi pajak daerah
				Pengelolaan retribusi daerah, bagi hasil dan pendapatan lain-lain	Jumlah realisasi retribusi daerah dan lain-lain PAD
				Operasional & pemungutan pelayanan pajak daerah serta retribusi daerah (35 UPT)	Jumlah penerimaan PAD di UPT (35 UPT)



LAPORAN KINERJA 2020

		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Rata-rata SKM	Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penurunan temuan SPI
					Persentase TLHP eksternal dan internal
			Persentase Tingkat kepatuhan wajib pajak	Pengembangan pelayanan pajak daerah	Persentase layanan yang bersertifikat
			Persentase wajib pajak pengguna layanan unggulan samsat	Pengembangan system teknologi informasi pendapatan	Service Level Agreement (SLA)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Perencanaan anggaran dan pelaporan perangkat daerah	Persentase indicator program perangkat daerah yang tercapai



				Pelayanan kesekretariat Bapenda Prov Jatim	Persen- tase reali- sasi anggaran
					Indeks profesio- nalitas ASN

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arak Kebijakan
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	1. Meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan	1. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor melalui status objek pajak
	2. Menyesuaikan besaran nilai jual kendaraan bermotor	2. Evaluasi terhadap kebijakan yang mendasari penetapan harga pasaran umum sebagai dasar penghitungan nilai jual kendaraan bermotor



<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Arak Kebijakan</i>
	3. Menentukan asumsi dalam perhitungan target PAD	3. Menggunakan akurasi data objek dan perkembangan situasi ekonomi masyarakat sebagai basis perhitungan potensi
	4. Penegakan hukum terhadap regulasi pemungutan pajak daerah	4. Mendorong stakeholder dalam evaluasi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak daerah
	5. Meningkatkan validasi atas pajak daerah yang bersifat self assessment	5. Mengoptimalkan pengawasan atas pelaporan pajak yang bersifat self assessment
	6. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha	6. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk ATM, TNKB dan space promosi pada UPT/KB. Samsat
	7. Mengoptimalkan penerimaan retribusi tempat pelelangan	7. Meningkatkan koordinasi dengan pihak perum perhutani dalam meningkatkan kualitas kayu yang akan di lelang
	8. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan lain-lain	8. Meningkatkan kerjasama dengan pihak Pemerintah Kabupaten / Kota terkait fasilitasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan



Sasaran	Strategi	Arak Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Standarisasi dan sertifikasi prosedur pelayanan	1. Pelaksanaan audit dan sertifikasi/standarisasi layanan melalui ISO
	2. Mengembangkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor	2. Evaluasi nilai standar kepuasan masyarakat
	3. Meningkatkan kompetensi aparatur pendukung pelayanan	3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas teknologi informasi dengan pihak eksternal
		4. Mengikutsertakan aparatur pendukung pelayanan dalam pendidikan pelatihan / bimbingan teknis terkait pelayanan publik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	1. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah
	2. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan	2. Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung
	3. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	3. Memetakan ASN sesuai dengan potensi masing-masing
	4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis bagi ASN
		5. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan



2.3 Struktur Program dan Kegiatan 2020

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana table berikut:

Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Timur	2.422.589.924
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Timur	2.398.649.924
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Timur	8.940.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Timur	15.000.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Selatan	2.090.994.232
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Selatan	2.019.644.232



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Selatan</i>	41.950.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Selatan</i>	29.400.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Utara	2.260.798.412
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Utara</i>	2.226.548.412
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Utara</i>	11.250.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Utara</i>	23.000.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Barat	1.885.810.810
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Barat</i>	1.836.010.810
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Barat</i>	16.200.000



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Barat</i>	33.600.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Mojokerto	1.920.200.721
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Mojokerto</i>	1.897.700.721
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Mojokerto</i>	6.000.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Mojokerto</i>	16.500.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sidoarjo	3.030.628.452
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sidoarjo</i>	2.995.598.052
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Sidoarjo</i>	13.430.400
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Sidoarjo</i>	21.600.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bojonegoro	1.148.729.192
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bojonegoro</i>	1.124.329.192



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bojonegoro</i>	4.400.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bojonegoro</i>	20.000.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jombang	2.234.211.500
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Jombang</i>	2.194.891.500
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Jombang</i>	19.520.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Jombang</i>	19.800.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Gresik	1.942.871.648
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Gresik</i>	1.880.221.648
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Gresik</i>	34.050.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Gresik</i>	28.600.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lamongan	1.346.698.824
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik</i>	1.318.748.824



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Lamongan	
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Lamongan	9.200.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Lamongan	18.750.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Nganjuk	1.402.559.355
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Nganjuk	1.361.859.355
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Nganjuk	18.500.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Nganjuk	22.200.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tuban	1.264.895.740
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Tuban	1.229.345.740
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Tuban	16.800.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Tuban	18.750.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi	1.660.803.217



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	Daerah UPT PPD Malang Kota	
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Kota	1.644.803.217
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Kota	3.500.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Malang Kota	12.500.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Selatan	1.384.462.968
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Selatan	1.338.462.968
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Selatan	29.000.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Malang Selatan	17.000.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	1.861.671.193
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	1.833.921.193



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota</i>	19.200.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota</i>	8.550.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Blitar	1.591.169.096
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Blitar</i>	1.560.669.096
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Blitar</i>	13.400.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Blitar</i>	17.100.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pasuruan	2.106.243.643
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pasuruan</i>	2.065.993.643
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Pasuruan</i>	23.750.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pasuruan</i>	16.500.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Banyuwangi	1.839.767.814
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik</i>	1.804.767.814



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Banyuwangi	
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Banyuwangi	11.200.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Banyuwangi	23.800.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jember	2.306.702.110
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Jember	2.193.702.110
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Jember	67.400.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Jember	45.600.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Probolinggo	2.043.382.914
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Probolinggo	2.000.482.914
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Probolinggo	16.500.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Probolinggo	26.400.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan	1.251.483.606



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lumajang	
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Lumajang	1.223.983.606
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Lumajang	7.700.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Lumajang	19.800.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Situbondo	1.278.996.176
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Situbondo	1.259.946.176
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Situbondo	3.200.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Situbondo	15.850.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bondowoso	1.188.069.640
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bondowoso	1.152.869.640



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bondowoso</i>	15.400.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bondowoso</i>	19.800.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Kediri	2.595.499.546
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Kediri</i>	2.553.099.546
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Kediri</i>	12.700.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Kediri</i>	29.700.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Madiun	1.809.055.373
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Madiun</i>	1.756.105.373
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Madiun</i>	32.950.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Madiun</i>	20.000.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ponorogo	1.667.737.777
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Ponorogo</i>	1.643.637.777



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Ponorogo</i>	7.600.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Ponorogo</i>	16.500.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tulungagung	1.235.265.841
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Tulungagung</i>	1.203.665.841
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Tulungagung</i>	16.600.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Tulungagung</i>	15.000.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Magetan	1.383.347.243
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Magetan</i>	1.349.297.243
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Magetan</i>	19.050.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Magetan</i>	15.000.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ngawi	1.599.021.617



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Ngawi	1.567.771.617
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Ngawi	12.500.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Ngawi	18.750.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Trenggalek	1.346.154.213
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Trenggalek	1.314.554.213
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Trenggalek	13.600.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Trenggalek	18.000.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pacitan	1.237.795.403
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pacitan	1.215.407.903
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Pacitan	7.387.500
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pacitan	15.000.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pacitan	1.290.883.328



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pamekasan	1.271.083.328
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Pamekasan	7.800.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pamekasan	12.000.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bangkalan	1.267.293.277
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bangkalan	1.241.823.277
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bangkalan	8.220.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bangkalan	17.250.000
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sampang	1.176.308.238
	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sampang	1.162.608.238
	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Sampang	4.700.000
	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Sampang	9.000.000



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sumenep	1.269.346.304
	<i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sumenep</i>	1.232.246.304
	<i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Sumenep</i>	7.400.000
	<i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep</i>	29.700.000
	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	734.932.400
	<i>Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</i>	674.250.000
	<i>Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah</i>	51.182.400
	<i>Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah</i>	9.500.000
	Program Pengelolaan Pajak Daerah	1.187.790.000
	<i>Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB</i>	1.030.490.000
	<i>Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya</i>	157.300.000
	Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan	623.140.000
	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah</i>	245.375.000
	<i>Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak</i>	132.298.000



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	50.000.000
	Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	195.467.000
	Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	1.490.780.258
	Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan	55.796.000
	Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	1.434.984.258
	Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	1.080.782.702
	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan	120.423.085
	Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah	435.333.112
	Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas	525.026.505
	Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan	1.513.731.400
	Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal	217.331.400
	Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi	24.000.000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan	700.200.000



Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	
	Pemenuhan Sarana Prasaran Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah	572.200.000
	Program Pelayanan Kesekretariatan	89.961.927.350
	Pengelolaan Administrasi Keuangan	888.370.000
	Ketatausahaan dan Kepegawaian	44.192.801.935
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah	13.615.666.096
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah	31.265.089.319
	Program Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	383.812.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	380.312.000
	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	3.500.000
Total Anggaran Yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		156.318.345.457



2.4 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 selain itu sebagai bentuk koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar dokumen perencanaan tahunan maka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 juga berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Selain sinergitas antar dokumen perencanaan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi perencanaan dengan penganggaran, sehingga dengan perencanaan yang baik diharapkan deviasi antara perencanaan dengan penganggaran tidak terlalu besar. Dan juga maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai panduan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.



2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

No	Sasaran strategi	Indikator kinerja	Target 2020
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah	(22,51%)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	80,00%
		Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	87,79
		Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan	51,42%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05



Tabel 2.5

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Pelayanan Kesekretariatan	Rp	89.961.927.350	APBD
2	Perencanaan Anggaran & Pelaporan Perangkat Daerah	Rp	383.812.000	APBD
3	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Timur	Rp	2.422.589.924	APBD
4	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Selatan	Rp	2.090.994.232	APBD
5	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Utara	Rp	2.260.798.412	APBD
6	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Barat	Rp	1.885.810.810	APBD



No	Program	Anggaran		Keterangan
7	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Mojokerto	Rp	1.920.200.721	APBD
8	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sidoarjo	Rp	3.030.628.452	APBD
9	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bojonegoro	Rp	1.148.729.192	APBD
10	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jombang	Rp	2.234.211.500	APBD
11	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Gresik	Rp	1.942.871.648	APBD
12	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lamongan	Rp	1.346.698.824	APBD



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program	Anggaran		Keterangan
13	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Nganjuk	Rp	1.402.559.355	APBD
14	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tuban	Rp	1.264.895.740	APBD
15	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Kota	Rp	1.660.803.217	APBD
16	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Selatan	Rp	1.384.462.968	APBD
17	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Utara & Batu	Rp	1.861.671.193	APBD
18	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Blitar	Rp	1.591.169.096	APBD



No	Program	Anggaran		Keterangan
19	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pasuruan	Rp	2.106.243.643	APBD
20	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Banyuwangi	Rp	1.839.767.814	APBD
21	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jember	Rp	2.306.702.110	APBD
22	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Probolinggo	Rp	2.043.382.914	APBD
23	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lumajang	Rp	1.251.483.606	APBD
24	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Situbondo	Rp	1.278.996.176	APBD



No	Program	Anggaran		Keterangan
25	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bondowoso	Rp	1.188.069.640	APBD
26	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Kediri	Rp	2.595.499.546	APBD
27	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Madiun	Rp	1.809.055.373	APBD
28	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ponorogo	Rp	1.667.737.777	APBD
29	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tulungagung	Rp	1.235.265.841	APBD
30	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Magetan	Rp	1.383.347.243	APBD



No	Program	Anggaran		Keterangan
31	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ngawi	Rp	1.599.021.617	APBD
32	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Trenggalek	Rp	1.346.154.213	APBD
33	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pacitan	Rp	1.237.795.403	APBD
34	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pamekasan	Rp	1.290.883.328	APBD
35	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bangkalan	Rp	1.267.293.277	APBD
36	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sampang	Rp	1.176.308.238	APBD



No	Program	Anggaran		Keterangan
37	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sumenep	Rp	1.269.346.304	APBD
38	Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Rp	734.932.400	APBD
39	Pengelolaan Pajak Daerah	Rp	1.187.790.000	APBD
40	Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan	Rp	623.140.000	APBD
41	Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Rp	1.490.780.258	APBD
42	Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	1.080.782.702	APBD
43	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan	Rp	1.513.731.400	APBD
Jumlah		Rp	156.318.345.457	APBD



Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020
- 3.2 Evaluasi & Analisa Capaian Kinerja
- 3.3 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2019

III. //

Akuntabilitas Kinerja

3.1 *Capaian Kinerja Tahun 2020*

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang telah disepakati pada awal tahun 2020. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja pada sasaran, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Realisasi Kinerja

<i>Interval Nilai Realisasi Kinerja</i>	<i>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</i>	<i>Kode</i>
91 - 100	Sangat Baik	Biru
76 - 90	Tinggi	Biru Muda
66 - 75	Sedang	Kuning Tua
51 - 65	Rendah	Kuning Muda
≤ 50	Sangat Rendah	Merah



**Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur**

<i>Sasaran Strategi</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target 2020</i>	<i>Realisasi 2020</i>	<i>Capaian</i>
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah	(22,51%)	(7,14%)	31,72%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	80,00%	84,34%	105,43%
	Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	87,79	88,92	101,29%
	Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan	51,42%	62,05%	120,67%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	84,06	105,01%
Rata-rata Capaian				92,82%

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 92,82% Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan



Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah tercapai dengan kategori **Sangat Baik**.

Sementara itu perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2020 dibawah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi Tahun					Capaian
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	(22,51%)	2,21%	12,34%	4,96%	3,04%	(7,14%)	31,72%
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	80,00%	87,88%	88,37%	89,51%	88,39%	84,34%	105,43%
Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	87,79	87,28	86,84	88,06	88,32	88,92	101,29%
Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	51,42%	49,49%	51,41%	62,33%	60,49%	62,05%	120,67%
Nilai SAKIP Perangkat daerah	80,05	-	-	-	-	84,06	105,01%



3.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaannya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis, untuk lebih lanjut dapat dijelaskan pada uraian berikut :

1. *Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan penerimaan PAD Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tabel 3.4 Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2019 dan Tahun 2020 (IKU 1)

<i>Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2014)</i>	<i>Realisasi Tahun 2019</i>	<i>Realisasi Tahun 2020</i>	<i>0% Realisasi</i>	<i>0% Agregat Realisasi</i>
11.539.074.054.595				
TW I	3.075.599.181.095	3.132.738.924.386	0,37%	0,37%
TW II	6.746.375.015.196	6.517.945.432.032	(1,47%)	(1,84%)
TW III	10.796.326.292.827	10.044.821.003.516	(4,83%)	(3,36%)
TW IV	15.547.541.013.282	14.437.788.945.967	(7,14%)	(2,30%)
Total				(7,14%)

** Data Realisasi Tahun 2020 setelah dikurangi dengan pendapatan denda pajak & denda retribusi*

<i>Target IKU 1</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
(22,51%)	(7,14%)	31,72%

Dengan rumus :

$$\frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{n-1}} \times 100\%$$



PAD_n : realisasi PAD tahun berjalan

PAD_{n-1} : realisasi PAD tahun lalu

$$\frac{\text{Realisasi PAD tahun berjalan} - \text{Realisasi PAD tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD tahun lalu}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 14.437.788.945.967 - \text{Rp } 15.547.541.013.282}{\text{Rp } 15.547.541.013.282} \times 100\% = (7,14\%)$$

Dapat dijelaskan bahwa indikator Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli daerah tumbuh negatif karena tidak optimalnya penerimaan sektor Pajak Daerah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Perubahan Kebijakan Keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Salah satu poin kebijakan yang ditekankan oleh Pemerintah untuk mendorong sektor perekonomian adalah pemberian stimulus dan keringanan perpajakan kepada pengusaha / masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian insentif Pajak Daerah;
- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan April hingga Mei 2020 serta pembatasan aktivitas / perjalanan selama masa libur panjang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pengeluaran



masyarakat cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi konsumsi barang kena Pajak Daerah Provinsi;

- Terbatasnya upaya tagih selama masa pandemi, yaitu penyampaian administrasi perpajakan dan kegiatan penegakan hukum di tempat (operasi bersama) yang mayoritas merupakan kegiatan tatap muka dan berpotensi menimbulkan kerumunan.
- Implikasi dari batasan sebagaimana disebut di atas adalah turunnya penerimaan beberapa sektor Pajak Daerah sebagai berikut:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), turun 4,71% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang disebabkan oleh:
- Kehilangan sebagian pokok pajak karena kebijakan insentif/pengurangan pokok PKB selama periode Juni – Agustus 2020;
- Pemberian insentif pajak tidak cukup untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak, karena yang melaksanakan pendaftaran ulang selama tahun 2020 hanya sebesar 84,34%;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), turun 28,60% dari realisasi tahun 2019, disebabkan oleh berkurangnya permintaan/konsumsi kendaraan baru baik di tingkat nasional maupun regional. Pertumbuhan objek kendaraan baru terdaftar di Jawa Timur tercatat hanya sebesar 646.835 unit, lebih rendah 39,9% atau



turun sebanyak 427.447 unit apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini berdampak signifikan terhadap penerimaan sektor BBNKB karena mayoritas penerimaannya berasal dari BBNKB penyerahan pertama;

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), turun 12,10% dari realisasi tahun 2019, disebabkan karena berkurangnya volume penyaluran hingga 10,07% atau sebesar 815 ribu kilo liter, akibat pembatasan aktivitas pergerakan barang maupun manusia pada saat PSBB maupun pembatasan lainnya pada saat memasuki libur panjang. Faktor berpengaruh lainnya adalah perubahan harga jual sebagian jenis BBM (Perta Series dan Solar Non Subsidi) yang lebih rendah 4,44 apabila dibandingkan dengan tahun 2019;
- Pajak Air Permukaan (PAP), tumbuh 2,28% dari realisasi tahun 2019, yang salah satunya disebabkan karena pembayaran piutang Pajak Air Permukaan oleh operator Migas di Provinsi Jawa Timur;
- Pajak Rokok, tumbuh 35,70% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, salah satunya karena besaran potongan Rokok untuk JKN Tahun 2020 tidak sebesar tahun 2019.

Untuk tetap dapat memenuhi target PAD di tengah pandemi COVID-19, maka arah kebijakan yang dilakukan adalah :



- a. Menyesuaikan target pendapatan daerah secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
- b. Menyesuaikan pola pendataan/penagihan objek Pajak Daerah dengan memanfaatkan database dan lebih menekankan interaksi melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi, daripada interaksi tatap muka langsung dengan wajib pajak.

Detail realisasi per jenis pungutan (PAD) dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur)

<i>Jenis Pungutan</i>	<i>Target P-APBD</i>	<i>Realisasi</i>
PKB	5.600.000.000.000	6.566.187.985.216
BBNKB	2.550.000.000.000	3.022.188.308.400
PBBKB	1.950.000.000.000	2.086.916.789.124
PAP	27.000.000.000	33.653.095.089
PAJAK ROKOK	2.250.000.000.000	2.703.415.327.323
RET. JASA USAHA	3.000.000.000	3.760.153.230
PENERIMAAN LAIN-LAIN	18.000.000.000	21.667.287.585
JUMLAH	12.398.000.000.000	14.437.788.945.967



2. *Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*

Indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya serta sebagai tolok ukur dan landasan untuk menetapkan kebijakan perpajakan di masa depan. Capaian indikator kinerja ini tidak optimal karena pandemi virus Covid-19 yang berdampak pada pengetatan aktivitas perekonomian nasional maupun regional. Salah satu kebijakan Pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut adalah memberikan stimulus dan keringanan perpajakan untuk mengurangi beban masyarakat/pengusaha karena tekanan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespon kebijakan Pemerintah dengan menerapkan 3 (tiga) kebijakan insentif Pajak Daerah sebagai berikut:

- Bebas Sanksi Administratif (denda) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada bulan April hingga Agustus 2020;
- Pengurangan sebagian pokok PKB sebesar 5% untuk R4 dan 15% untuk R2 selama bulan Juni hingga Agustus 2020;
- Pembebasan pokok BBNKB penyerahan II dan Bebas Sanksi Administratif (denda) PKB dan BBNKB selama bulan September hingga November 2020.



Secara kumulatif pemberian insentif Pajak Daerah diiringi dengan upaya tagih yang dilakukan oleh petugas pajak, ternyata belum cukup untuk menjaga tingkat kepatuhan dalam rentang 88%, karena prioritas utama Daerah adalah menjaga akumulasi penerimaan Pajak Daerah sehingga kebijakan pemberian insentif Pajak Daerah harus dihitung secara proporsional dengan memperhitungkan potensi kehilangan sebagian penerimaan dari pokok Pajak Daerah.

Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang telah melakukan pengesahan ulang sampai tahun 2020 terealisasi sebesar 84,34% dari target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 80%. Sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori **sangat baik**. Berikut Kami sajikan Tabel Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020 :

Tabel 3.6 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020 (IKU 2)

Tahun 2020	Objek Wajib Penul	Objek Penul	Realisasi	Agregat Realisasi (0%)
TW I	13.828.621	2.724.071	19,70%	19,70%
TW II	14.099.918	5.406.283	38,34%	18,64%
TW III	14.444.943	8.959.691	62,03%	23,68%
TW IV	14.849.443	12.524.522	84,34%	22,32%
Jumlah				84,34%

Target IKU 2	Realisasi	Capaian
80,00%	84,34%	105,43%



Dengan Rumus :

$$\frac{\sum \text{kendaraan penul (tahun n)}}{\sum \text{kendaraan wajib penul (tahun n)}} \times 100\%$$

$$\frac{12.524.522}{14.849.443} \times 100\% = 84,34\%$$

3. *Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*

Indikator Rata-rata Nilai SKM pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 87,79 dan terealisasi sebesar 88,92 atau 101,28%, penilaian survey kepuasan masyarakat ini dilaksanakan melalui Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur. Indikator Nilai SKM ini bisa tercapai karena adanya pengendalian intern secara berkala oleh aparatur Bapenda dan seluruh jajaran personel yang ada pada Samsat seluruh Jawa Timur, untuk memastikan bahwa penanganan keluhan masyarakat berjalan secara optimal atau sepenuhnya ditindaklanjuti. Tim Pembina Samsat juga berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas standar pelayanan melalui penerapan standar mutu pelayanan ISO 9001:2015 pada KB. Samsat, sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan dapat terjaga dan terstandar.

Serta Kantor Bersama Samsat se-Jawa Timur dalam pelaksanaan pelayanan **WAJIB** menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain :



- a. Petugas dan Wajib Pajak HARUS menggunakan masker;
- b. Petugas WAJIB menggunakan sarung tangan dan pelindung wajah (Face Shield);
- c. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki area layanan;
- d. Menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk dan Hand Sanitizer disetiap meja layanan;
- e. Menjaga jarak (Physical Distancing) di area layanan;
- f. Sterilisasi ruang layanan dengan desinfektan;
- g. Optimalisasi sirkulasi ruang layanan dan mengatur antrian.

Berikut rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan KB. Samsat tahun 2020 :

Tabel 3.7 Rekapitulasi & Capaian Kinerja IKU 3 Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

No.	KB. SAMSAT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Rekapitulasi
1	SURABAYA TIMUR	87,88	87,90	88,56	89,57	88,48
2	SURABAYA SELATAN	90,27	90,55	91,30	92,05	91,04
3	SURABAYA BARAT	87,41	89,05	89,42	89,49	88,84
4	SURABAYA UTARA	88,86	88,97	89,02	89,03	88,97
5	MOJOKERTO	87,80	87,83	88,56	88,98	88,29
6	SIDOARJO KRIAN	87,77	87,83	87,83	87,36	87,70
7	SIDOARJO KOTA	87,58	87,93	87,91	87,94	87,84



LAPORAN KINERJA 2020

No.	KB. SAMSAT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Rekapitulasi
8	GRESIK	86,93	86,97	87,00	90,56	87,87
9	JOMBANG	89,84	89,85	89,59	89,88	89,79
10	BOJONEGORO	89,27	87,99	87,69	88,23	88,29
11	TUBAN	88,71	88,73	88,73	88,74	88,73
12	LAMONGAN	87,10	94,79	90,65	90,97	90,88
13	NGAWI KOTA	90,95	88,15	88,17	88,19	88,87
14	NGAWI WIDODAREN	90,34	88,82	88,56	88,57	89,07
15	MADIUN KABUPATEN	86,69	87,05	87,23	87,23	87,05
16	MADIUN KOTA	87,02	87,47	87,33	90,85	88,17
17	MAGETAN	91,10	91,47	91,65	91,75	91,49
18	PONOROGO	89,26	90,12	91,87	90,48	90,43
19	PACITAN	86,77	86,78	86,47	88,44	87,11
20	KEDIRI KAB. KATANG	87,75	87,91	87,97	88,12	87,94
21	KEDIRI KAB. PARE	87,73	87,73	87,76	89,45	88,17
22	KEDIRI KOTA	87,75	87,75	88,95	91,58	89,01
23	NGANJUK	88,30	88,33	88,33	88,74	88,43
24	TULUNGAGUNG	89,67	89,69	89,70	92,85	90,48
25	TRENGGALEK	89,39	89,40	89,80	90,58	89,79
26	MALANG KOTA	88,63	88,64	88,66	89,58	88,88
27	MALANG SELATAN	89,10	89,39	89,70	90,33	89,63



LAPORAN KINERJA 2020

No.	KB. SAMSAT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Rekapitulasi
28	MALANG UTR KR. PLOSO	89,91	84,53	89,73	91,54	88,93
29	MALANG UTR BATU	87,69	89,97	89,97	90,97	89,65
30	BLITAR KOTA	87,80	87,85	88,57	89,00	88,31
31	BLITAR KABUPATEN	87,85	87,92	89,70	93,00	89,62
32	PROBOLINGGO KOTA	86,82	86,80	88,98	89,85	88,12
33	PROBOLINGGO KRAKSAAN	86,80	86,82	88,83	89,51	87,99
34	LUMAJANG	89,43	89,45	89,47	90,56	89,73
35	PASURUAN KOTA	88,22	88,04	88,38	89,73	88,59
36	PASURUAN KAB/BANGIL	88,32	88,56	88,84	90,99	89,18
37	SITUBONDO	88,37	88,39	89,78	91,58	89,53
38	JEMBER BARAT (SOEBANDI)	86,61	86,64	87,22	88,73	87,30
39	JEMBER TIMUR (TERATAI)	86,61	87,89	88,59	87,05	87,53
40	BONDOWOSO	90,79	90,77	90,81	92,79	91,29
41	BANYUWANGI	90,18	90,52	91,67	92,05	91,11
42	BANYUWANGI BENCULUK	91,35	91,89	92,88	93,88	92,50
43	PAMEKASAN	89,83	89,85	89,88	91,86	90,35
44	SAMPANG	88,14	88,30	89,83	90,93	89,30
45	BANGKALAN	86,33	86,55	88,50	88,99	87,59
46	SUMENEP	88,41	88,48	89,85	90,65	89,35



No.	KB. SAMSAT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Rekapitulasi
Nilai Total SKM		4.051	4.069	4.072	4.076	4.143,24
Nilai Rata-rata SKM Per TW		88,46	88,53	88,62	90,07	88,92
Nilai Rata-rata SKM Tahun 2019						

Target IKU 3	Realisasi	Capaian
87,79	88,92	101,29%

Dengan rumus :

$$\frac{N \text{ SKM}_{1-46}}{\sum KB \text{ SAMSAT}}$$

$N \text{ SKM}_{1-46}$: nilai total SKM pada 46 KB. SAMSAT

$$\frac{4.143,24}{46 \text{ KB. Samsat}} = 88,92$$



Berikut grafik capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020 :

**Grafik 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014-2020 untuk IKU:
Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**



Berikut Rencana Tindak Lanjut yang segera dilakukan untuk mencapai Kepuasan Masyarakat :

- Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, diprioritaskan pada unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah, yaitu unsur waktu pelayanan dengan nilai unsur pelayanan, dimana kecepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan masih dinyatakan kurang cepat, sehingga



- akan terus ditingkatkan agar pelayanan pada Kantor Bersama Samsat dapat tepat waktu sesuai prosedur;
- b. Selain itu fasilitas sarana dan prasarana yang sudah baik akan terus ditingkatkan dengan terus memperbaharui sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang terselesainya pelayanan secara tepat waktu;
 - c. Untuk penanganan pengaduan akan terus ditingkatkan demi kenyamanan, keamanan dan kelancaran pengguna layanan (Wajib Pajak);

4. *Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan*

Indikator Persentase WP Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan, pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 51,42% dan terealisasi sebesar 62,05% atau melampaui target sebesar 120,67%. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur yang pada tahun 2020 melakukan inovasi pengembangan pelayanan pembayaran PKB secara online melalui jaringan ritel nasional dan *marketplace*, guna memberi alternatif kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Pengembangan pelayanan pembayaran ini direspon positif oleh masyarakat, terlebih di masa pandemi dimana kontak fisik secara langsung sebaiknya dihindari atau dilaksanakan seminimal mungkin, sehingga indikator kinerja ini bisa tercapai dengan positif. Selain itu,



Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur juga senantiasa menciptakan inovasi pelayanan publik yang disesuaikan dengan kearifan masyarakat setempat, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di daerah semakin mudah, cepat, pasti dan dekat.

Berikut Kami sajikan data capaian pada IKU 4 (Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan) di tahun 2020 :

Tabel 3.8 Data Pengguna Layanan Samsat Unggulan IKU 4 Tahun 2020

<i>Tahun 2020</i>	<i>WP Penggunaan Layanan Unggulan</i>	<i>WP Penggunaan Layanan Keseluruhan</i>	<i>%</i>
Triwulan 1	2.060.153	2.724.071	75,63%
Triwulan 2	3.161.906	5.406.283	58,49%
Triwulan 3	5.444.370	8.959.691	60,77%
Triwulan 4	7.770.891	12.524.522	62,05%

<i>Target IKU 4</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
51,42%	62,05%	120,67%

Dengan rumus :

$$\frac{\text{Wajib Pajak pengguna layanan unggulan}}{\text{Wajib Pajak pengguna layanan keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{7.770.891}{12.524.522} \times 100\% = 62,05\%$$



3.2.1 Realisasi Anggaran

Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2020 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan :

Tabel 3.9 Komposisi Belanja Bapenda Prov. Jatim TA. 2020

<i>Jenis Belanja</i>	<i>Tahun 2019</i>		
	<i>Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
Belanja Tidak Langsung	324.424.239.000	317.504.174.657	97,87
Belanja Langsung	156.318.345.457	147.929.341.853	94,63
<i>Jumlah</i>	<i>480.742.584.457</i>	<i>465.433.516.510</i>	<i>96,82</i>



Tabel 3.10 Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
A	Program Pelayanan Kesekretariatan	89.961.927.350	84.476.597.958	93,90	5.485.329.392
1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	888.370.000	819.644.700	92,26	68.725.300
2	Ketatausahaan dan Kepegawaian	44.192.801.935	42.085.712.749	95,23	2.107.089.186
3	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah	13.615.666.096	12.229.757.406	89,82	1.385.908.690
4	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah	31.265.089.319	29.341.483.103	93,85	1.923.606.216
B	Program Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	383.812.000	359.052.310	93,55	24.759.690



No	Progam/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	380.312.000	355.642.310	93,51	24.669.690
2	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	3.500.000	3.410.000	97,43	90.000
C	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Timur	2.422.589.924	2.283.062.064	94,24	139.527.860
1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Timur	2.398.649.924	2.259.280.064	94,19	139.369.860
2	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Timur	8.940.000	8.782.000	98,23	158.000
3	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Timur	15.000.000	15.000.000	100,00	0



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
4	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Selatan	2.090.994.232	1.983.672.138	94,87	107.322.094
5	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Selatan	2.019.644.232	1.912.322.138	94,69	107.322.094
6	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Selatan	41.950.000	41.950.000	100,00	0
7	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Selatan	29.400.000	29.400.000	100,00	0
8	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Utara	2.260.798.412	2.207.203.671	97,63	53.594.741



No	Progam/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
9	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Utara	2.226.548.412	2.173.456.171	97,62	53.092.241
10	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Utara	11.250.000	10.747.500	95,53	502.500
11	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Utara	23.000.000	23.000.000	100,00	0
12	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Barat	1.885.810.810	1.755.458.862	93,09	130.351.948
13	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Barat	1.836.010.810	1.713.188.862	93,31	122.821.948
14	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Barat	16.200.000	8.670.000	53,52	7.530.000



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
15	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Barat	33.600.000	33.600.000	100,00	0
16	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Mojokerto	1.920.200.721	1.779.277.843	92,66	140.922.878
17	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Mojokerto	1.897.700.721	1.763.428.843	92,92	134.271.878
18	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Mojokerto	6.000.000	5.949.000	99,15	51.000
19	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Mojokerto	16.500.000	9.900.000	60,00	6.600.000
20	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sidoarjo	3.030.628.452	2.866.280.388	94,58	164.348.064



No	Progam/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
21	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sidoarjo	2.995.598.052	2.831.254.788	94,51	164.343.264
22	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Sidoarjo	13.430.400	13.425.600	99,96	4.800
23	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Sidoarjo	21.600.000	21.600.000	100,00	0
24	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bojonegoro	1.148.729.192	1.099.049.262	95,68	49.679.930
25	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bojonegoro	1.124.329.192	1.075.379.262	95,65	48.949.930
26	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bojonegoro	4.400.000	4.320.000	98,18	80.000



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
27	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bojonegoro	20.000.000	19.350.000	96,75	650.000
28	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jombang	2.234.211.500	2.075.561.178	92,90	158.650.322
29	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Jombang	2.194.891.500	2.038.243.678	92,86	156.647.822
30	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Jombang	19.520.000	17.517.500	89,74	2.002.500
31	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Jombang	19.800.000	19.800.000	100,00	0
32	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Gresik	1.942.871.648	1.781.965.179	91,72	160.906.469



No	Progam/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
33	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Gresik	1.880.221.648	1.720.367.479	91,50	159.854.169
34	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Gresik	34.050.000	32.997.700	96,91	1.052.300
35	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Gresik	28.600.000	28.600.000	100,00	0
36	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lamongan	1.346.698.824	1.301.411.291	96,64	45.287.533
37	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Lamongan	1.318.748.824	1.280.937.291	97,13	37.811.533
38	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Lamongan	9.200.000	7.974.000	86,67	1.226.000
39	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Lamongan	18.750.000	12.500.000	66,67	6.250.000



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
40	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Nganjuk	1.402.559.355	1.336.565.652	95,29	65.993.703
41	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Nganjuk	1.361.859.355	1.301.577.652	95,57	60.281.703
42	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Nganjuk	18.500.000	17.288.000	93,45	1.212.000
43	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Nganjuk	22.200.000	17.700.000	79,73	4.500.000
44	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tuban	1.264.895.740	1.215.675.289	96,11	49.220.451
45	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Tuban	1.229.345.740	1.180.225.289	96,00	49.120.451



No	Progam/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
46	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Tuban	16.800.000	16.700.000	99,40	100.000
47	Penyelenggara- an Operasi Bersama di UPT PPD Tuban	18.750.000	18.750.000	100,00	0
48	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Kota	1.660.803.217	1.572.013.167	94,65	88.790.050
49	Penyelenggara- an Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Kota	1.644.803.217	1.556.013.167	94,60	88.790.050
50	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Kota	3.500.000	3.500.000	100,00	0
51	Penyelenggara- an Operasi Bersama di UPT PPD Malang Kota	12.500.000	12.500.000	100,00	0



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
52	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Selatan	1.384.462.968	1.345.308.477	97,17	39.154.491
53	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Selatan	1.338.462.968	1.303.483.477	97,39	34.979.491
54	Pendaftaran Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Selatan	29.000.000	24.825.000	85,60	4.175.000
55	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Malang Selatan	17.000.000	17.000.000	100,00	0
56	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	1.861.671.193	1.803.738.304	96,89	57.932.889



No	Progam/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
57	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	1.833.921.193	1.775.988.304	96,84	57.932.889
58	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	19.200.000	19.200.000	100,00	0
59	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	8.550.000	8.550.000	100,00	0
60	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Blitar	1.591.169.096	1.563.826.785	98,28	27.342.311
61	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Blitar	1.560.669.096	1.533.326.785	98,25	27.342.311
62	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Blitar	13.400.000	13.400.000	100,00	0

BAPENDA PROV. JATIM



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
63	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Blitar	17.100.000	17.100.000	100,00	0
64	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pasuruan	2.106.243.643	2.016.029.265	95,72	90.214.378
65	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pasuruan	2.065.993.643	1.978.315.265	95,76	87.678.378
66	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Pasuruan	23.750.000	22.314.000	93,95	1.436.000
67	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pasuruan	16.500.000	15.400.000	93,33	1.100.000
68	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Banyuwangi	1.839.767.814	1.739.223.263	94,53	100.544.551



No	Progam/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
69	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Banyuwangi	1.804.767.814	1.706.368.763	94,55	98.399.051
70	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Banyuwangi	11.200.000	9.054.500	80,84	2.145.500
71	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Banyuwangi	23.800.000	23.800.000	100,00	0
72	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jember	2.306.702.110	2.206.828.187	95,67	99.873.923
73	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Jember	2.193.702.110	2.121.858.187	96,72	71.843.923
74	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Jember	67.400.000	46.420.000	68,87	20.980.000



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
75	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Jember	45.600.000	38.550.000	84,54	7.050.000
76	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Probolinggo	2.043.382.914	1.947.988.083	95,33	95.394.831
77	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Probolinggo	2.000.482.914	1.905.758.083	95,26	94.724.831
78	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Probolinggo	16.500.000	15.830.000	95,94	670.000
79	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Probolinggo	26.400.000	26.400.000	100,00	0
80	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi	1.251.483.606	1.178.243.670	94,15	73.239.936



No	Progam/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
	Daerah UPT PPD Lumajang				
81	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Lumajang	1.223.983.606	1.154.443.670	94,32	-9.539.936
82	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Lumajang	7.700.000	5.100.000	66,23	2.600.000
83	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Lumajang	19.800.000	18.700.000	94,44	1.100.000
84	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Situbondo	1.278.996.176	1.220.072.326	95,39	58.923.850
85	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Situbondo	1.259.946.176	1.201.022.526	95,32	58.923.650
86	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Situbondo	3.200.000	3.199.800	99,99	200



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
87	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Situbondo	15.850.000	15.850.000	100,00	0
88	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bondowoso	1.188.069.640	1.161.097.421	97,73	26.972.219
89	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bondowoso	1.152.869.640	1.125.897.421	97,66	26.972.219
90	Pendaftaran Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bondowoso	15.400.000	15.400.000	100,00	0
91	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bondowoso	19.800.000	19.800.000	100,00	0
92	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Kediri	2.595.499.546	2.470.459.410	95,18	125.040.136



No	Progam/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
93	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Kediri	2.553.099.546	2.428.919.410	95,14	124.180.136
94	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Kediri	12.700.000	11.840.000	93,23	860.000
95	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Kediri	29.700.000	29.700.000	100,00	0
96	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Madiun	1.809.055.373	1.711.563.446	94,61	97.491.927
97	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Madiun	1.756.105.373	1.663.199.846	94,71	92.905.527
98	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Madiun	32.950.000	28.363.600	86,08	4.586.400
99	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Madiun	20.000.000	20.000.000	100,00	0



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
100	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ponorogo	1.667.737.777	1.647.136.313	98,76	20.601.464
101	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Ponorogo	1.643.637.777	1.623.127.638	98,75	20.510.139
102	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Ponorogo	7.600.000	7.508.675	98,80	91.325
103	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Ponorogo	16.500.000	16.500.000	100,00	0
104	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tulungagung	1.235.265.841	1.203.955.004	97,47	31.310.837



No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
105	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Tulungagung	1.203.665.841	1.173.605.004	97,50	30.060.837
106	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Tulungagung	16.600.000	16.600.000	100,00	0
107	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Tulungagung	15.000.000	13.750.000	91,67	1.250.000
108	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Magetan	1.383.347.243	1.338.036.848	96,72	45.310.395
109	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Magetan	1.349.297.243	1.303.986.848	96,64	45.310.395



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
110	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Magetan	19.050.000	19.050.000	100,00	0
111	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Magetan	15.000.000	15.000.000	100,00	0
112	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ngawi	1.599.021.617	1.561.136.446	97,63	37.885.171
113	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Ngawi	1.567.771.617	1.533.526.446	97,82	34.245.171
114	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Ngawi	12.500.000	10.110.000	80,88	2.390.000
115	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Ngawi	18.750.000	17.500.000	93,33	1.250.000
116	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi	1.346.154.213	1.270.457.680	94,38	75.696.533



No	Progam/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
	Daerah UPT PPD Trenggalek				
117	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Trenggalek	1.314.554.213	1.239.707.680	94,31	74.846.533
118	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Trenggalek	13.600.000	12.750.000	93,75	850.000
119	Penyelenggara- an Operasi Bersama di UPT PPD Trenggalek	18.000.000	18.000.000	100,00	0
120	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pacitan	1.237.795.403	1.132.945.681	91,53	104.849.722
121	Penyelenggara- an Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pacitan	1.215.407.903	1.113.468.181	91,61	101.939.722
121	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Pacitan	7.387.500	4.477.500	60,61	2.910.000



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
122	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pacitan	15.000.000	15.000.000	100,00	0
123	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pamekasan	1.290.883.328	1.227.457.108	95,09	63.426.220
124	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pamekasan	1.271.083.328	1.209.926.308	95,19	61.157.020
125	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Pamekasan	7.800.000	5.930.800	76,04	1.869.200
126	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pamekasan	12.000.000	11.600.000	96,67	400.000
127	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi	1.267.293.277	1.207.391.942	95,27	59.901.335



No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
	Daerah UPT PPD Bangkalan				
128	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bangkalan	1.241.823.277	1.181.921.942	95,18	59.901.335
129	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bangkalan	8.220.000	8.220.000	100,00	0
130	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bangkalan	17.250.000	17.250.000	100,00	0
131	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sampang	1.176.308.238	1.136.254.311	96,59	40.053.927
132	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sampang	1.162.608.238	1.125.457.911	96,80	37.150.327



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
133	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Sampang	4.700.000	1.796.400	38,22	2.903.600
134	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Sampang	9.000.000	9.000.000	100,00	0
135	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sumenep	1.269.346.304	1.237.558.170	97,50	31.788.134
136	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sumenep	1.232.246.304	1.200.559.170	97,43	31.687.134
137	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Sumenep	7.400.000	7.299.000	98,64	101.000
138	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep	29.700.000	29.700.000	100,00	0



No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
D	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	734.932.400	720.655.516	98,06	14.276.884
1	Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	674.250.000	664.840.916	98,60	9.409.084
2	Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah	51.182.400	50.537.500	98,74	644.900
3	Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	9.500.000	5.277.100	55,55	4.222.900
E	Program Pengelolaan Pajak Daerah	1.187.790.000	1.164.522.594	98,04	23.267.406
1	Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB	1.030.490.000	1.014.261.141	98,43	16.228.859
2	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	157.300.000	150.261.453	95,53	7.038.547



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
F	Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan	623.140.000	603.685.729	96,88	19.454.271
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah	245.375.000	238.811.373	97,33	6.563.627
2	Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak	132.298.000	127.025.323	96,01	5.272.677
3	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	50.000.000	48.584.800	97,17	1.415.200
4	Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	195.467.000	189.264.233	96,83	6.202.767
G	Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	1.490.780.258	1.429.677.306	95,90	61.102.952
1	Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan	55.796.000	55.516.000	99,50	280.000



No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
2	Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	1.434.984.258	1.374.161.306	95,76	60.822.952
H	Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	1.080.782.702	1.076.209.200	99,58	4.573.502
1	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan	120.423.085	117.661.700	97,71	2.761.385
2	Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah	435.333.112	434.561.600	99,82	771.512
3	Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas	525.026.505	523.985.900	99,80	1.040.605
I	Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan	1.513.731.400	1.484.992.387	98,10	28.739.013
1	Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal	217.331.400	217.100.282	99,89	231.118



LAPORAN KINERJA 2020

No	Progam/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
2	Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi	24.000.000	23.377.700	97,41	622.300
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	700.200.000	694.030.405	99,12	6.169.595
4	Pemenuhan Sarana Prasaran Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah	572.200.000	550.484.000	96,20	21.716.000
Jumlah		156.318.345.457	147.929.341.853	94,63	8.389.003.604



3.2.2 Cost Per Outcome

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome).

Tujuan dari pada Cost per Outcome adalah menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Langsung Per Sasaran Tahun 2020

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		T	R	Capaian	T	R	Capaian
Meningkatnya PAD	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	(22,51%)	(7,14%)	31,72%	61.887.311.747	59.072.767.963	95,45%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	80,00%	84,34%	105,43%	1.490.780.258	1.429.677.306	95,90%
	Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	87,79	88,92	101,29%	1.080.782.702	1.076.209.200	99,58%
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	51,42%	62,05%	120,67%	1.513.731.400	1.484.992.387	98,10%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	84,06	105,01%	90.345.739.350	84.846.837.647	93,91%
Jumlah					156.318.345.457	147.929.341.853	94,63%



Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program Tahun 2020 (yang mendukung capaian sasaran strategi)

No	Program	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
IKU 1				
1	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	734.932.400	720.655.516	98,06%
2	Program Pengelolaan Pajak Daerah	1.187.790.000	1.164.522.594	98,04%
3	Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan	623.140.000	603.685.729	96,88%
4	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah	59.341.449.347	56.583.904.124	95,35%
IKU 2				
5	Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	1.490.780.258	1.429.677.306	95,90%
IKU 3				



LAPORAN KINERJA 2020

No	Program	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
6	Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	1.080.782.702	1.076.209.200	99,58%
IKU 4				
7	Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan	1.513.731.400	1.484.992.387	98,10%
IKU 5				
8	Pelayanan Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah	89.961.927.350	84.487.785.337	93,92%
9	Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	383.812.000	359.052.310	93,55%
Jumlah		156.318.345.457	147.929.341.853	94,63%



3.2.3 Analisis Efisiensi

Rincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Per Sasaran

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	31,72%	95,45%	33,23%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	105,43%	95,90%	109,94%
		Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	101,29%	99,58%	101,72%
		Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	120,67%	98,10%	123,01%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	105,01%	93,91%	111,82%



Tingkat efisiensi **sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dengan indikator persentase kenaikan penerimaan PAD tercapai sebesar 33,23% dari anggaran Rp 61.887.311.747 pada 4 (empat) program yaitu Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, program Pengelolaan Pajak Daerah, Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan, Program Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

Untuk tingkat efisiensi **sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik** :

- a. Dengan indikator persentase tingkat kepatuhan wajib pajak tercapai sebesar 109,94% dari anggaran Rp 1.490.780.258 pada program pengembangan pelayanan pajak daerah;
- b. Untuk indikator nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat tercapai sebesar 101,72% dari anggaran Rp 1.080.782.702 pada program pengendalian operasional, administrasi pajak dan retribusi daerah;
- c. Serta untuk indikator persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan samsat unggulan tercapai sebesar 123,01% dari anggaran Rp 1.513.731.400 pada program pengembangan sistem teknologi informasi pendapatan.

Untuk tingkat efisiensi **sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah** : Dengan indikator



Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai sebesar 111,82% dari anggaran Rp 90.345.739.350 pada program Pelayanan Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah dan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah;

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas utama yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja telah dilaksanakan seluruhnya, adapun tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi (Th. 2020)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	2,11%	(7,14%)	(338,39%)
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,20%	84,34%	95,62%
		Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	87,99	88,92	101,06%



LAPORAN KINERJA 2020

		Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	51,62%	62,05%	120,21%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,25	84,06	104,75%

3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 2019

Saran/Rekomendasi		Tindak Lanjut	
Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 700/18023/031.2/2020, perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dengan rekomendasi :		Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:	
1	Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan budaya kinerja, Perangkat Daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan keberhasilan prestasi kinerja yang sudah tercapai, namun dapat meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan, berupa komitmen bersama mulai antar bidang hingga dengan	1	Sudah dilaksanakan



Saran/Rekomendasi		Tindak Lanjut	
	Perangkat Daerah lain yang terkait secara holistik dan spasial		
2	Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan Renstra Tahun 2019 – 2024 sebagai acuan dalam membangun Organisasi. Apabila diperlukan, perlu dilakukan pemutahiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini	2	Pada saat ini sedang dilakukan proses perubahan Renstra
3	Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP	3	Akan dilakukan penyusunan
4	Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI yang telah ada agar bias dioptimalkan. Memastikan seluruh jajaran (terutama UPT) agar dapat memanfaatkan aplikasi dengan baik	4	Telah dilaksanakan pemanfaatan TI pada monitoring, mengukur, menagih dan capaian kinerja pada aplikasi E-Master dan aplikasi SIAAP untuk mengetahui kinerja masing-masing personil dalam mengukur dan menagih tunggakan pajak sesuai dengan klaster masing-masing
5	Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terutama pada level UPT	5	Akan dilaksanakan peningkatan kapasitas SDM dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pada level UPT



Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
6 Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur agar senantiasa melakukan upaya inovasi untuk melakukan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan	6 Telah dilakukan inovasi berbasis TI pada tahun 2020 yaitu : Griya Bayar Bank BTN, Tokopedia, Link Aja, Indomaret, Alfamart dengan potensi di tahun 2020 sebesar Rp 352.181.601.650. Sedangkan untuk tahun 2021 akan melakukan inovasi : • Easy Samsat : merupakan inovasi pelayanan samsat melalui aplikasi smartphone, merupakan pengembangan dan penggabungan inovasi "e-smart samsat jatim" pada tahun 2017 dengan "samsat 4.0" pada tahun 2020 • Pecel Oncom : pelayanan cepat langsung online cetak mandiri (kerjasama samsat jatim dengan BUMdes)





- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Permasalahan
- 4.3 Langkah Selanjutnya

IV. //

Penutup

4.1 *Kesimpulan*

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, pencapaian skor kinerja dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada periode tersebut secara keseluruhan adalah 92,82%, menurun dari skor capaian kinerja periode sebelumnya yakni Tahun 2019 yang dicapai sebesar 116,47%.

Capaian di tahun 2020 didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar Rp 147.929.341.853 atau sebesar 94,63 % dari anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp 156.318.345.457



4.2 Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah di tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal, yang secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemulihan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah diperkirakan baru akan pulih pada tahun 2022, seiring dengan membaiknya konsumsi barang kena Pajak Daerah Provinsi dan berakhirnya kewajiban untuk memberikan insentif/keringanan Pajak Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi.
2. Belum meredanya penyebaran virus COVID-19, berakibat pada tidak optimalnya kapasitas pelayanan di Kantor Bersama Samsat/Samsat Unggulan untuk memenuhi tuntutan protokol kesehatan seperti pengurangan kapasitas maksimal ruang layanan, pembatasan jam operasional (tentatif) dan rotasi on/off petugas pelayanan.
3. Pengembangan layanan e-channel, masih perlu diuji efektifitasnya, karena jumlah transaksinya masih dibawah harapan, dimana pada tahun 2020 hanya mencapai 5,8% dari total pembayaran PKB. Penambahan jumlah titik pelayanan oleh mitra belum direspon secara masif meskipun telah terjadi



peningkatan nominal transaksi hingga 446% apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

4. Pembatasan aktivitas kontak langsung dengan masyarakat pada masa pandemi COVID-19, menuntut perubahan pola penyampaian administrasi perpajakan dan penagihan pajak daerah dari semula tatap muka menjadi elektronik. Konversi pola penagihan ini masih perlu diawasi dan diuji efektivitasnya karena pergerakan data kepemilikan kendaraan bermotor sebagai objek pajak relatif tinggi.
5. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, khususnya yang mengatur tentang intervensi tarif berpotensi mengurangi penerimaan Pajak Daerah apabila penetapan tarif dibawah batasan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.



Di samping itu, terdapat beberapa peluang yang diperkirakan dapat mendukung pengembangan pelayanan, antara lain:

1. Rencana perubahan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan kebijakan perubahan skema Bagi Hasil Pajak dan opsen Pajak Pusat/Pajak Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
3. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan;
5. Terbentuknya pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik antara para pihak penyelenggara pelayanan, akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.



4.3 Langkah Selanjutnya



Untuk tetap dapat memenuhi target Pendapatan Asli Daerah ditengah pandemi COVID-19, maka berikut adalah arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :



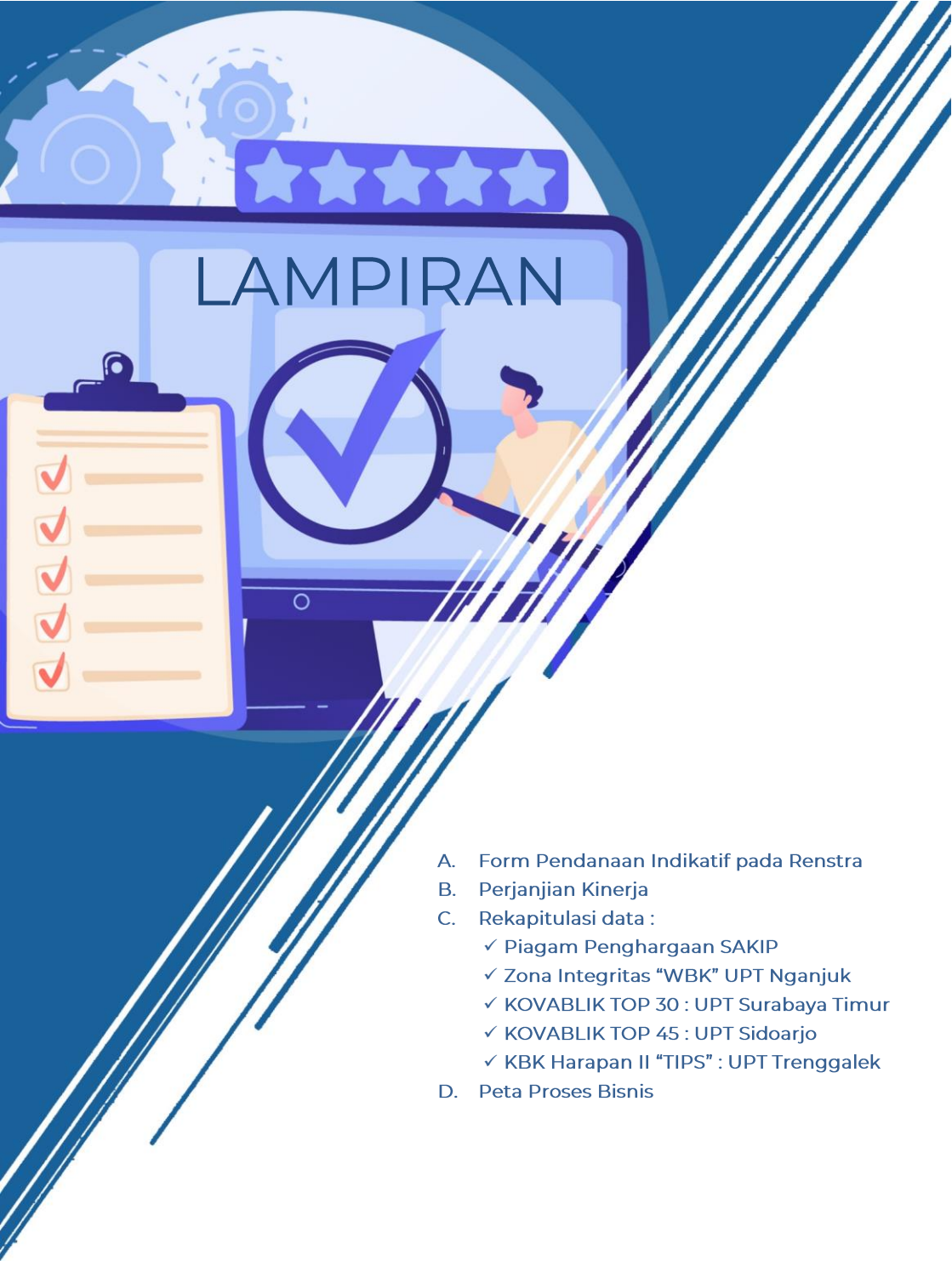
1. Menyesuaikan target pendapatan daerah secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
2. Memberikan reward bagi wajib pajak yang patuh membayar kendaraan bermotor melalui mekanisme pengundian. Pemberian apresiasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan animo masyarakat untuk membayar pajak daerah tepat waktu;
3. Memberikan stimulus pajak untuk masyarakat Jawa Timur, dalam bentuk relaksasi pajak/pengurangan sebagian pokok pajak/pembebasan denda pajak atau bentuk lainnya untuk meringankan beban masyarakat dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Menyesuaikan pola pendataan/penagihan objek Pajak Daerah dengan memanfaatkan database dan lebih menekankan interaksi melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi, daripada interaksi tatap muka langsung dengan wajib pajak;
5. Mengoptimalkan sosialisasi kebijakan pajak daerah, dengan titik berat model interaktif/rekaman/video di media radio, televisi, media online untuk diseminasi program/kebijakan pajak daerah;



6. Menambah mitra kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, untuk meningkatkan radius jangkauan pelayanan.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara memadai kepada publik, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.





- A. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rekapitulasi data :
 - ✓ Piagam Penghargaan SAKIP
 - ✓ Zona Integritas “WBK” UPT Nganjuk
 - ✓ KOVABLIK TOP 30 : UPT Surabaya Timur
 - ✓ KOVABLIK TOP 45 : UPT Sidoarjo
 - ✓ KBK Harapan II “TIPS” : UPT Trenggalek
- D. Peta Proses Bisnis

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

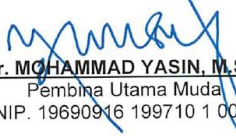
Surabaya, Oktober 2020

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690916 199710 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah	-22,51%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	80,00%
		Nilai Rata-rata SKM	87,79
		Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan	51,42%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05

	Program	Anggaran	Ket
1.	Pelayanan Kesekretariatan	Rp 89.961.927.350,00	APBD
2.	Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Rp 383.812.000,00	APBD
3.	Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Timur	Rp 2.422.589.924,00	APBD
4.	Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Selatan	Rp 2.090.994.232,00	APBD
5.	Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Utara	Rp 2.260.798.412,00	APBD
6.	Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Barat	Rp 1.885.810.810,00	APBD
7.	Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Mojokerto	Rp 1.920.200.721,00	APBD
8.	Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sidoarjo	Rp 3.030.628.452,00	APBD
9.	Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bojonegoro	Rp 1.148.729.192,00	APBD
10.	Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jombang	Rp 2.234.211.500,00	APBD
11.	Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Gresik	Rp 1.942.871.648,00	APBD
12.	Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lamongan	Rp 1.346.698.824,00	APBD

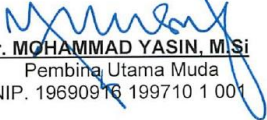
13. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Nganjuk	Rp	1.402.559.355,00	APBD
14. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tuban	Rp	1.264.895.740,00	APBD
15. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Kota	Rp	1.660.803.217,00	APBD
16. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Selatan	Rp	1.384.462.968,00	APBD
17. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	Rp	1.861.671.193,00	APBD
18. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Blitar	Rp	1.591.169.096,00	APBD
19. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pasuruan	Rp	2.106.243.643,00	APBD
20. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Banyuwangi	Rp	1.839.767.814,00	APBD
21. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jember	Rp	2.306.702.110,00	APBD
22. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Probolinggo	Rp	2.043.382.914,00	APBD
23. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lumajang	Rp	1.251.483.606,00	APBD
24. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Situbondo	Rp	1.278.996.176,00	APBD
25. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bondowoso	Rp	1.188.069.640,00	APBD
26. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Kediri	Rp	2.595.499.546,00	APBD
27. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Madiun	Rp	1.809.055.373,00	APBD
28. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ponorogo	Rp	1.667.737.777,00	APBD
29. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tulungagung	Rp	1.235.265.841,00	APBD

30. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Magetan	Rp	1.383.347.243,00	APBD
31. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ngawi	Rp	1.599.021.617,00	APBD
32. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Trenggalek	Rp	1.346.154.213,00	APBD
33. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pacitan	Rp	1.237.795.403,00	APBD
34. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pamekasan	Rp	1.290.883.328,00	APBD
35. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bangkalan	Rp	1.267.293.277,00	APBD
36. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sampang	Rp	1.176.308.238,00	APBD
37. Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sumenep	Rp	1.269.346.304,00	APBD
38. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Rp	734.932.400,00	APBD
39. Pengelolaan Pajak Daerah	Rp	1.187.790.000,00	APBD
40. Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan	Rp	623.140.000,00	APBD
41. Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Rp	1.490.780.258,00	APBD
42. Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	1.080.782.702,00	APBD
43. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan	Rp	1.513.731.400,00	APBD dan DID
Jumlah	Rp	156.318.345.457,00	

Surabaya, Oktober 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690916 199710 1 001

SAKIP
Nilai : A (Memuaskan)



ZONA INTEGRITAS
Wilayah Bebas dari Korupsi
UPT Nganjuk



KOVABLIK

Top 30 : Samsat 4.0

UPT Surabaya Timur



KOVABLIK

Top 45 : Sambel Bajak

UPT Sidoarjo



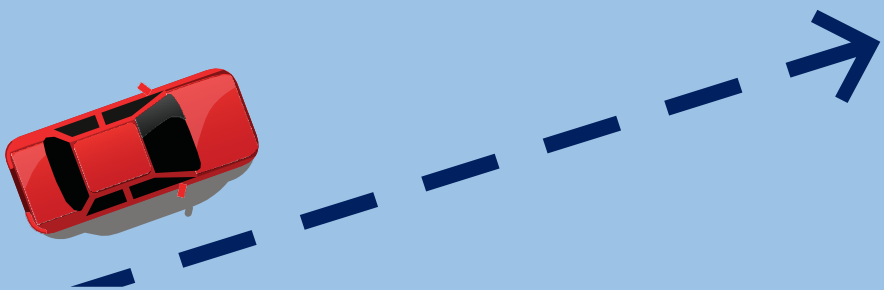
KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)

Harapan II (Tips)

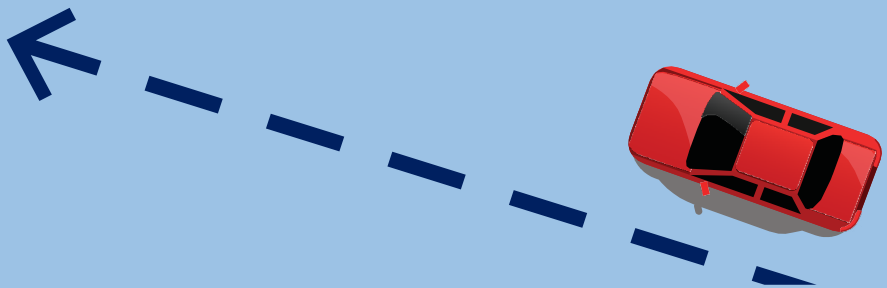
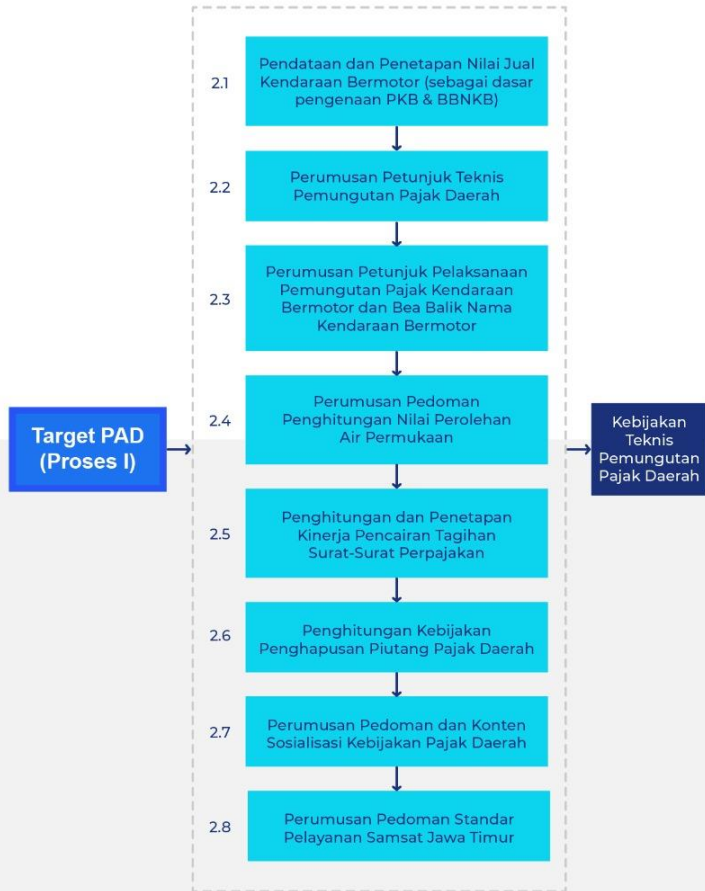
UPT Trenggalek



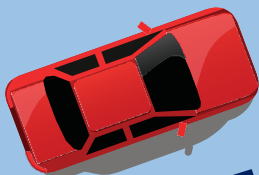
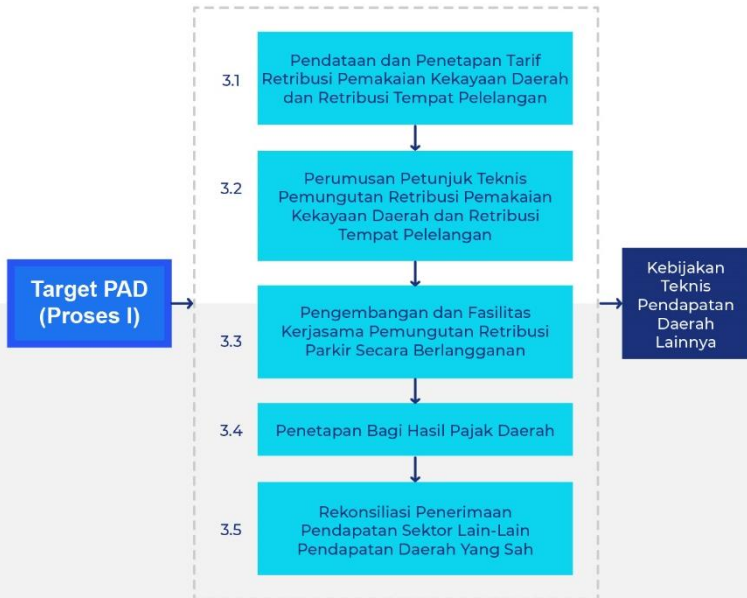
Peta Proses Bisnis



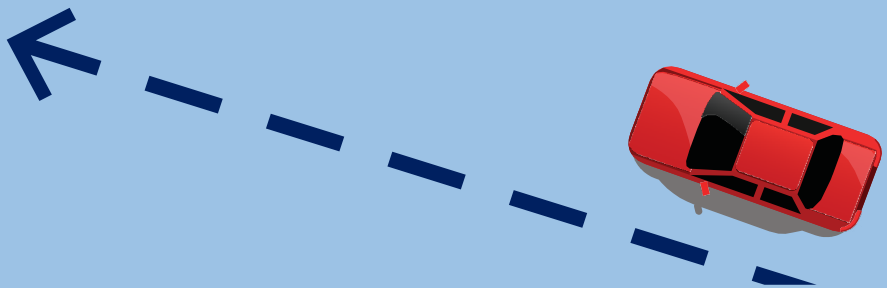
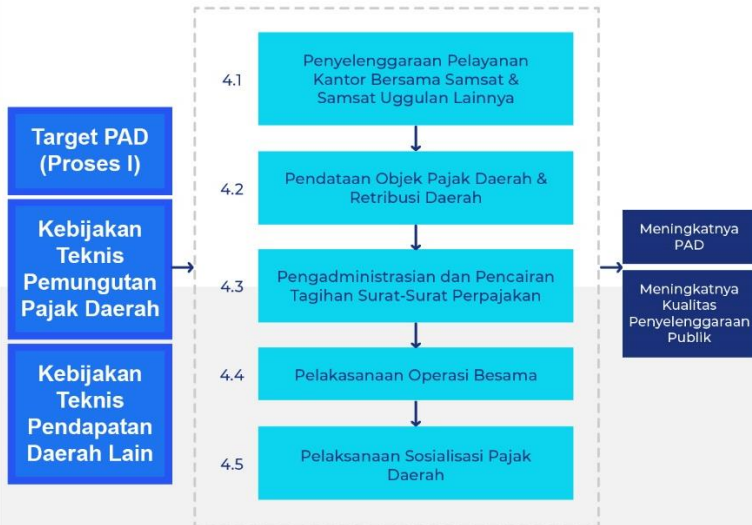
PROSES II PERUMUSAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH



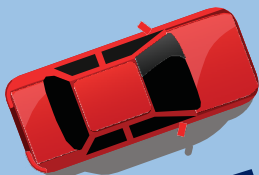
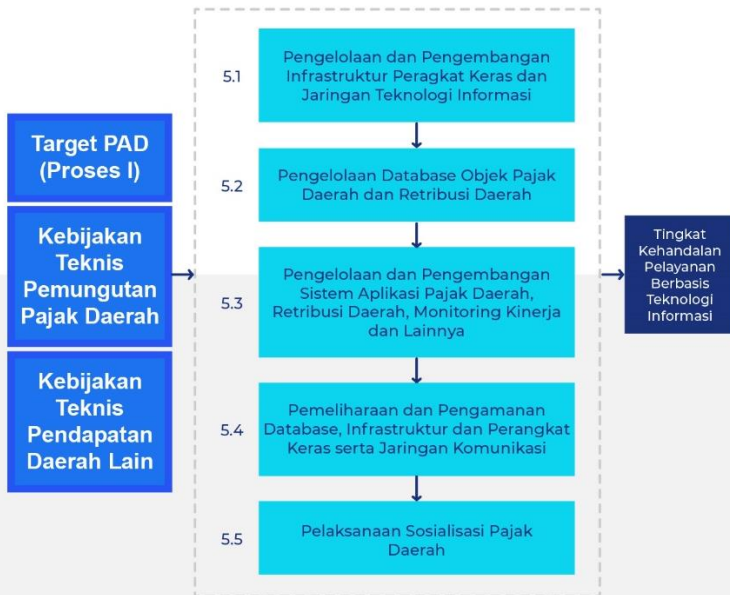
PROSES III PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAPATAN LAINNYA



PROSES IV PEMUNGUTAN PAD & PENYELENGGARAAN PELAYANAN



PROSES V PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI



PROSES VI PENGENDALIAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

